

**PENGARUH TINGKAT PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL
PEMERIKSAAN, JUMLAH TEMUAN PEMERIKSAAN LHP BPK, DAN
KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH PADA OPINI ATAS LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021-2023**



UNTAR
Universitas Tarumanagara

DIAJUKAN OLEH:

NAMA : MUHAMMAD GILANG PERMATA ARDINANTO

NIM : 126232078

PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

JAKARTA

2024

LAPORAN TUGAS AKHIR

**PENGARUH TINGKAT PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL
PEMERIKSAAN, JUMLAH TEMUAN PEMERIKSAAN LHP BPK, DAN
KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH PADA OPINI ATAS LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021-2023**



DIAJUKAN OLEH:

NAMA : MUHAMMAD GILANG PERMATA ARDINANTO

NIM : 126232078

**UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT UNTUK KELULUSAN PADA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN**

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

JAKARTA

2024

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

**PENGARUH TINGKAT PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL
PEMERIKSAAN, JUMLAH TEMUAN PEMERIKSAAN LHP BPK, DAN
KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH PADA OPINI ATAS LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021-2023**

Laporan Tugas Akhir

Disusun Oleh:



Muhammad Gilang Permata Ardinanto
126232078

Disetujui Oleh:

Pembimbing



Dr. Jamaludin Iskak, M.Si., Ak., CACP., CA., CFL., CPA., ASEAN CPA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat tindak lanjut penyelesaian temuan audit, jumlah temuan audit dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), dan karakteristik pemerintah daerah terhadap opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021–2023. Populasinya terdiri dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan, dengan sampel ditentukan menggunakan teknik sensus sampling. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat penyelesaian tindak lanjut, jumlah temuan audit, dan karakteristik pemerintah daerah termasuk PAD, pengeluaran, umur, dan aset tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit. Hasil ini menunjukkan bahwa opini audit lebih dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap standar pelaporan keuangan dan sistem pengendalian internal yang efektif dibandingkan oleh kapasitas fiskal atau pengalaman manajerial saja.

Kata Kunci : Temuan Pemeriksaan, Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut, Karakteristik Pemerintah Daerah, Opini Audit

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of the follow-up completion rate of audit findings, the number of audit findings from BPK (Audit Board of Indonesia), and the characteristics of local governments on the audit opinion of local government financial reports in South Sulawesi Province for the fiscal years 2021–2023. The population consists of all districts/cities in South Sulawesi Province, with samples determined using census sampling techniques. The data used in this study are secondary data sourced from BPK's audit reports. The analysis method employed is logistic regression analysis. The findings reveal that the follow-up completion rate, number of audit findings, and local government characteristics, including PAD, expenses, age, and assets, do not significantly influence the audit opinion. These results indicate that audit opinions are influenced more by compliance with financial reporting standards and effective internal control systems rather than by fiscal capacity or managerial experience alone.

Keywords : Audit Findings, Follow-up Completion Rate, Local Government Characteristics, Audit Opinion.

KATA PENGANTAR

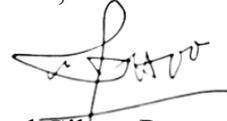
Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmat-Nya, yang memungkinkan penulis untuk menyelesaikan karya akhir ini dengan baik. Karya akhir ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Pendidikan Profesi Akuntan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.

Dalam proses penulisan karya akhir ini, penulis telah menerima banyak bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M. selaku Ketua Rektor Universitas Tarumanagara.
2. Dr. Sawidji Widodoatmojo, S.E., M.M., MBA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
3. Dr. Jamaludin Iskak, SE, MSi, Ak, CA, CPA, CPI, ASEAN CPA selaku Ketua Program Studi PPAk FEB Universitas Tarumanagara dan selaku Dosen Pembimbing yang telah berkontribusi dan menyediakan waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Seluruh dosen, staf, dan karyawan di PPA FEB Universitas Tarumanagara yang telah memberikan bantuan selama masa perkuliahan dan memberikan ilmu serta pengetahuan yang berguna bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Keluarga, teman dan sahabat yang telah memberikan dorongan dan dukungan penuh selama proses penulisan tugas akhir ini.

Penulis juga berharap tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dari berbagai latar belakang. Penulis menyampaikan permohonan maaf jika terdapat kesalahan, baik dalam penyampaian lisan maupun tulisan, yang mungkin terjadi selama proses penyusunan tugas akhir ini, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Jakarta, Desember 2024



Muhammad Gilang Permata Ardinanto

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II.....	8
2.1 Tinjauan Pustaka.....	8
2.2 Penelitian Terdahulu	16
2.3 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis	18
BAB III	20
3.1 Paradigma Penelitian	20
3.2 Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	20
3.3 Jenis dan Sumber Data	21
3.4 Metode Pengumpulan Data	22
3.5 Metode Analisis Data	22
BAB IV	25
4.1 Gambaran Umum	25
4.2 Hasil Penelitian.....	26
4.3 Pembahasan	37
BAB V.....	41
5.1 Kesimpulan.....	41
5.2 Keterbatasan Penelitian	42
5.3 Saran	42
DAFTAR PUSTAKA	45

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	16
Tabel 3.1	Definisi Operasional Variabel	20
Tabel 4.1	Analisis Deskriptif.....	26
Tabel 4.2	Hasil Uji Normalitas.....	28
Tabel 4.3	Uji Korelasi TLHP & OPINI.....	30
Tabel 4.4	Uji Korelasi JTP & OPINI	31
Tabel 4.5	Uji Korelasi WEALTH & OPINI.....	31
Tabel 4.6	Uji Korelasi EXPENSE & OPINI.....	32
Tabel 4.7	Uji Korelasi AGE & OPINI	32
Tabel 4.8	Uji Korelasi ASSET & OPINI.....	33
Tabel 4.9	Uji Koefisien Determinasi (R ²)	34
Tabel 4.10	Uji Hosmer & Lemeshow	34
Tabel 4.11	Matriks Klasifikasi	35
Tabel 4.12	Analisis Regresi Logistik	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	18
------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah instrumen vital dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Pengelolaan yang efektif dan efisien tidak hanya menjamin penggunaan dana publik sesuai peruntukannya, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, penyusunan LKPD yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi salah satu indikator utama dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah. Dalam hal ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia berperan sebagai lembaga independen yang memberikan opini atas LKPD untuk menilai sejauh mana prinsip transparansi dan akuntabilitas telah diterapkan dalam pengelolaan keuangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan terhadap LKPD dan memberikan opini audit yang dapat berupa Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Opini yang dihasilkan mencerminkan tingkat kualitas tata kelola keuangan suatu daerah. Opini WTP, misalnya, menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) tanpa adanya temuan material yang signifikan. Sebaliknya, opini WDP atau TW mengindikasikan adanya masalah atau temuan yang memerlukan perhatian lebih lanjut dari pemerintah daerah untuk segera diperbaiki.

Menurut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023 yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebanyak 591 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) telah diselesaikan. Laporan tersebut terdiri dari 1 laporan keuangan, 257 laporan terkait pemeriksaan kinerja, dan 333 laporan dengan tujuan tertentu (DTT) yang berfokus pada aspek kepatuhan. Dari

seluruh pemeriksaan tersebut, BPK mengeluarkan lebih dari 16.000 rekomendasi untuk menangani berbagai permasalahan yang ditemukan, baik di tingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD). Temuan ini mencerminkan masih adanya tantangan besar dalam tata kelola keuangan negara, khususnya dalam pengelolaan keuangan di sektor pemerintahan daerah.

Pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Selatan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pengelolannya dengan tujuan memperoleh opini yang lebih baik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Meskipun demikian, terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), di antaranya adalah tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, jumlah temuan audit, serta karakteristik khusus yang dimiliki oleh masing-masing pemerintah daerah.

Tingkat penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK merupakan salah satu indikator utama yang menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah menanggapi temuan dari proses audit. BPK memberikan berbagai rekomendasi kepada entitas yang diperiksa dengan tujuan memperbaiki kelemahan dalam sistem pengendalian internal, memitigasi potensi kerugian negara, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran. Keberhasilan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi ini memiliki pengaruh signifikan terhadap opini yang diberikan oleh BPK. Semakin tinggi tingkat penyelesaian tindak lanjut, semakin besar peluang bagi pemerintah daerah untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang merupakan opini tertinggi sebagai cerminan kepatuhan dan akuntabilitas yang optimal.

Menurut IHPS II Tahun 2023, masih terdapat sejumlah temuan yang belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, menunjukkan bahwa tingkat penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan di beberapa wilayah masih tergolong rendah. Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah dalam usaha memperbaiki kualitas laporan keuangan dan meningkatkan tata kelola keuangan mereka. Oleh karena itu, mempercepat dan memperkuat

tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan menjadi langkah strategis yang harus diambil oleh pemerintah daerah di Sulawesi Selatan untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik dan akuntabel.

Jumlah temuan yang diidentifikasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Temuan-temuan tersebut mencakup berbagai aspek, seperti ketidakpatuhan terhadap peraturan, kelemahan dalam sistem pengendalian internal, maupun penyimpangan dalam penggunaan anggaran. Banyaknya temuan yang ditemukan mengindikasikan adanya permasalahan sistemik dalam tata kelola keuangan yang memerlukan perhatian serius. Berdasarkan IHPS II Tahun 2023, BPK melaporkan sejumlah temuan signifikan pada tingkat pemerintah daerah, yang menunjukkan bahwa sebagian besar daerah masih belum sepenuhnya mematuhi aturan dan standar yang berlaku dalam pengelolaan keuangan publik.

Banyaknya temuan yang berulang dari tahun ke tahun menunjukkan kelemahan mendasar dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan daerah. Kelemahan ini, jika tidak segera diatasi, akan berdampak negatif terhadap opini yang diberikan oleh BPK, karena menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak mampu mengatasi permasalahan yang telah direkomendasikan dalam audit sebelumnya. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah di Sulawesi Selatan untuk secara serius mengatasi dan menindaklanjuti setiap temuan BPK untuk memastikan peningkatan kualitas laporan keuangannya.

Karakteristik pemerintah daerah, seperti kemampuan manajerial, kondisi keuangan, struktur organisasi, serta kompetensi sumber daya manusia, memiliki pengaruh terhadap kualitas pengelolaan keuangan dan opini BPK terhadap LKPD. Pemerintah daerah yang menunjukkan kapasitas manajerial yang unggul, didukung oleh tenaga kerja yang berkualitas dan struktur organisasi yang terstruktur dengan baik, cenderung lebih mampu mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel. Selain itu, kondisi keuangan yang stabil berkontribusi pada tersedianya sumber daya yang mencukupi untuk

mengatasi kelemahan dalam pengelolaan keuangan. Daerah dengan kondisi fiskal yang kuat dapat mengalokasikan investasi pada teknologi informasi yang mutakhir, pelatihan bagi sumber daya manusia, serta penguatan sistem pengendalian internal, yang semuanya merupakan elemen penting untuk menciptakan tata kelola keuangan yang berkualitas.

Di beberapa wilayah di Sulawesi Selatan, terdapat kendala dalam kapasitas manajerial dan fiskal yang menjadi hambatan utama dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan. Pemerintah daerah dengan keterbatasan fiskal sering menghadapi kesulitan dalam mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki sistem keuangan serta menerapkan teknologi informasi yang lebih canggih, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kualitas LKPD dan opini yang diberikan oleh BPK. Masalah ini diperburuk oleh rendahnya kompetensi sumber daya manusia di sejumlah daerah, yang menyebabkan kelemahan dalam penerapan sistem pengendalian internal serta ketidakpatuhan terhadap peraturan yang mengatur pengelolaan keuangan.

Sebagai salah satu provinsi yang tengah berkembang di Indonesia, Provinsi Sulawesi Selatan menghadapi tantangan unik dalam pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sejumlah daerah di provinsi ini masih menghadapi kesulitan dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kesulitan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang akuntansi pemerintahan, belum optimalnya implementasi sistem pengendalian internal, serta rendahnya kesadaran dan komitmen dari para pemangku kepentingan terhadap pentingnya tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Temuan-temuan ini mengindikasikan perlunya pemerintah daerah mengambil langkah-langkah perbaikan, seperti memperkuat kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan intensif, memperbaiki sistem pengendalian internal, serta meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil audit BPK. Dengan

menerapkan berbagai langkah tersebut, diharapkan pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Selatan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan mereka dan mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang, peneliti memutuskan untuk mengkaji topik ini dalam sebuah penelitian dengan judul “Pengaruh Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, Jumlah Temuan Pemeriksaan, dan Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021-2023”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penelitian ini merumuskan beberapa pertanyaan utama sebagai berikut:

- 1) Apakah Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan memiliki pengaruh terhadap Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
- 2) Apakah Jumlah Temuan Pemeriksaan memengaruhi Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
- 3) Bagaimana Karakteristik Pemerintah Daerah memengaruhi Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diidentifikasi, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Menganalisis pengaruh Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan terhadap Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- 2) Mengevaluasi pengaruh Jumlah Temuan Pemeriksaan terhadap Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- 3) Mengkaji pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang bermanfaat sebagai berikut:

- 1) Manfaat Akademis
 - a) Pengembangan Teori dalam Tata Kelola Keuangan Publik.

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori terkait tata kelola keuangan di sektor publik. Melalui analisis hubungan antara tingkat penyelesaian tindak lanjut, jumlah temuan audit, serta karakteristik pemerintah daerah terhadap opini laporan keuangan, penelitian ini memperluas literatur mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kualitas pengelolaan keuangan di sektor publik.

b) Peningkatan Pemahaman Akademis tentang Audit Pemerintahan.

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperluas pemahaman akademis tentang peran dan dampak audit eksternal, khususnya yang dilakukan oleh BPK, terhadap tata kelola keuangan pemerintah daerah. Temuan dari penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya yang berfokus pada audit sektor publik dan peningkatan akuntabilitas pemerintahan.

c) Model Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah.

Penelitian ini dapat berfungsi sebagai model atau kerangka kerja bagi akademisi dalam mengevaluasi kinerja keuangan daerah dengan menggunakan indikator seperti tingkat penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan, jumlah temuan, dan karakteristik pemerintah daerah. Kerangka ini juga dapat diterapkan pada studi serupa di wilayah lain atau digunakan untuk melakukan analisis perbandingan antar daerah.

2) Manfaat Praktis

a) Rekomendasi untuk Pemerintah Daerah.

Penelitian ini menawarkan rekomendasi praktis kepada pemerintah daerah, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan, mengenai strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Temuan penelitian ini mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, seperti peningkatan kapasitas dalam menindaklanjuti temuan audit dan pengurangan jumlah temuan yang berulang, sebagai langkah menuju pencapaian opini WTP.

b) Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan.

Dengan memahami berbagai faktor yang memengaruhi opini atas LKPD, pemerintah daerah dapat memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik. Penelitian ini dapat berfungsi sebagai panduan bagi para pejabat pemerintah untuk menerapkan tata kelola yang lebih efektif, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendukung keberhasilan program pembangunan di tingkat daerah.

c) Penguatan Pengawasan Internal dan Sistem Pengendalian.

Penelitian ini memberikan pemahaman mengenai pentingnya penguatan pengawasan dan sistem pengendalian internal di tingkat pemerintah daerah. Temuan penelitian ini dapat mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan mekanisme kontrol, memperkuat fungsi audit internal, serta mengalokasikan sumber daya secara lebih optimal guna memperbaiki respons terhadap rekomendasi hasil audit.

DAFTAR PUSTAKA

- Amyulianty, R., et al. (2020). *Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terhadap Opini Audit (Studi Pada Pemerintah Provinsi di Indonesia)*. Jurnal Penelitian Akuntansi, 1(1), 14 – 27.
- Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2017). *Auditing And Assurance Services: An Integrated Approach (16th ed.)*. Pearson.
- Bastian, I. (2019). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mahmudi. (2019). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Rumihin, R., et al. (2021). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Opini Audit atas Laporan Keuangan Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Tahun 2016-2018*. Jurnal Akuntansi, 1 – 13.
- Salsabila, R., Wahyudi, I. (2022). *Pengaruh Temuan Audit, Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, dan Ukuran Pemerintahan Daerah Terhadap Opini Audit pada Pemerintah Daerah di Indonesia*. AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional, 4(1), 38 – 45.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabet.
- Valentina, J. (2022). *Pengaruh Temuan SPI, Temuan Kepatuhan, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, dan Penyelesaian Kerugian Daerah Terhadap Opini Audit di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan*. Syntax Idea, 4(6), 951 – 970.
- Wahyuni, M. A., et al. (2023). *Pengaruh Temuan Audit dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) Terhadap Opini Audit Pemerintah Daerah Atas LKPD Kota/Kabupaten di Sumatera Utara TA 2020*. Journal of Innovation Research and Knowledge, 3(6), 1289 – 1301.